



BLACK SEA GRAIN INITIATIVE SEBAGAI INSTRUMEN STABILITAS GLOBAL: KETAHANAN PANGAN DAN GEOPOLITIK PASCA INVASI RUSIA

Raihana Dzakira Sudirman

raihanadzakiras@gmail.com

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

raihanadzakiras@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Krisis pangan global yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina menegaskan pentingnya diplomasi multilateral dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dunia. Artikel ini mengkaji peran strategis Black Sea Grain Initiative (BSGI) sebagai respons kolektif terhadap disrupsi logistik dan ketidakpastian pasar pangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kontribusi BSGI terhadap ketahanan pangan global serta tantangan geopolitik yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

kasus, memanfaatkan data sekunder dari dokumen resmi, laporan internasional, dan publikasi akademik. Temuan menunjukkan bahwa BSGI berhasil menstabilkan harga pangan global dalam jangka pendek dan mendukung distribusi biji-bijian ke negara berkembang. Namun, efektivitasnya terbatas oleh ketergantungan pada jalur logistik tunggal dan kerentanan terhadap dinamika politik. Studi ini menekankan perlunya reformasi tata kelola pangan global melalui diversifikasi rute distribusi dan kerangka hukum internasional yang lebih tangguh. Implikasi hasil ini memperkuat pentingnya pendekatan keamanan non-tradisional dan kerja sama internasional dalam mencegah krisis pangan di masa depan.

Kata kunci: diplomasi pangan, Black Sea Grain Initiative, ketahanan pangan global, konflik Rusia-Ukraina, geopolitik pangan

ABSTRACT

The global food crisis triggered by Russia's invasion of Ukraine underscores the critical role of multilateral diplomacy in ensuring food supply stability. This article examines the strategic function of the Black Sea Grain Initiative (BSGI) as a collective response to logistical disruptions and food market



uncertainty. The primary objective is to assess BSGI's contribution to global food security and analyze the geopolitical challenges affecting its effectiveness and continuity. A qualitative case study approach was employed, drawing on secondary data from official documents, international reports, and academic publications.

Findings reveal that BSGI contributed to short-term food price stabilization and enabled grain distribution to developing countries. However, its impact is constrained by reliance on a narrow logistics corridor and exposure to political instability. The study highlights the need for reforming global food governance through diversified supply routes and stronger international legal frameworks. The implications reinforce the importance of non-traditional security perspectives and international cooperation in preventing future food crises.

Keywords: *food diplomacy, Black Sea Grain Initiative, global food security, Russia-Ukraine conflict, food geopolitics*

PENDAHULUAN

Laut Hitam memainkan peran sentral sebagai jalur logistik utama dalam distribusi komoditas pertanian dunia, khususnya biji-bijian, yang berkontribusi dalam menjaga kestabilan pasokan pangan global secara signifikan. Dalam konteks ini, Federasi Rusia dan Ukraina mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai produsen utama dari sejumlah komoditas pertanian penting, termasuk gandum, jagung, dan minyak bunga matahari yang sangat dibutuhkan oleh pasar internasional (FAO, 2022b). Data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kedua negara tersebut menyumbang sekitar tiga puluh persen dari total ekspor gandum dunia. Jalur pelayaran di kawasan Laut Hitam memiliki fungsi strategis sebagai rute utama pengiriman komoditas pertanian menuju sejumlah wilayah yang sangat bergantung pada pasokan tersebut, seperti Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Ketergantungan yang tinggi dari negara-negara pengimpor terhadap suplai dari kawasan ini menyebabkan bahwa setiap bentuk gangguan terhadap alur distribusi di Laut Hitam berpotensi memberikan dampak serius terhadap stabilitas sistem pangan global yang pada dasarnya sudah rapuh.

Situasi global mengalami perubahan tajam sejak Februari 2022, setelah invasi militer Rusia ke Ukraina. Peristiwa tersebut mengguncang kestabilan kawasan dan memberikan implikasi signifikan pada perekonomian global, terutama terkait pasokan pangan. Dampak serangkaian gangguan rantai pasok terlihat jelas melalui Indeks Harga Pangan FAO. Pada



puncaknya di Maret 2022, indeks ini mencapai level tertinggi sejak pencatatan dimulai sebelum kemudian menunjukkan penurunan gradual, namun tetap berada sekitar 20 persen di atas rata-rata historisnya (FAO, 2022c). Dinamika tersebut mencerminkan tekanan harga yang kuat, utamanya pada kelompok komoditas seperti biji-bijian, minyak nabati, dan gula, yang secara langsung memengaruhi negara-negara rentan dengan pasokan pangan yang berfluktuasi.

Dampak perang tidak hanya dirasakan oleh negara-negara maju yang menghadapi lonjakan inflasi harga konsumsi, tetapi lebih parah menimpa negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah. Negara-negara ini, yang sebelumnya telah berjuang mengatasi kelangkaan pangan dan ketergantungan terhadap impor, kini menghadapi potensi krisis kemanusiaan yang kian dalam. Konflik bersenjata, sebagaimana dicontohkan dalam invasi Rusia ke Ukraina, telah menyebabkan krisis pangan di banyak negara, termasuk beberapa negara miskin seperti Kamerun, Kenya, dan Nigeria (Nguyen dkk., 2023). Ancaman kelaparan massal, meningkatnya angka malnutrisi, serta potensi timbulnya ketidakstabilan sosial merupakan konsekuensi nyata dari terganggunya distribusi pangan global. Konflik geopolitik berisiko menciptakan “lingkaran setan kekerasan dan kelaparan” yang tidak hanya berdampak pada wilayah konflik, tetapi juga memperburuk kerentanan pangan di kawasan lain (Nguyen dkk., 2023). Dalam konteks ini, urgensi untuk membangun mekanisme mitigasi yang tangguh menjadi sangat mendesak.

Menanggapi eskalasi krisis yang ditimbulkan oleh invasi militer Rusia ke Ukraina, Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama Pemerintah Turki mengambil langkah diplomatik strategis dengan meluncurkan Black Sea Grain Initiative (BSGI) pada Juli 2022. Inisiatif ini didirikan melalui penandatanganan dua kesepakatan: satu antara PBB dan Rusia untuk memfasilitasi ekspor pangan dan pupuknya ke pasar global, serta satu lagi yang melibatkan Rusia, Ukraina, dan Turki, dengan dukungan PBB, untuk memungkinkan ekspor yang aman atas komoditas pertanian seperti gandum, jagung, dan pupuk dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam (UNCTAD, 2023). Melalui pembentukan koridor maritim yang aman, BSGI berhasil membuka kembali akses ekspor yang sempat terblokir akibat konflik, sehingga berkontribusi dalam menurunkan harga pangan global, menstabilkan pasar, dan mencegah dampak krisis yang lebih parah, terutama bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang yang sangat bergantung pada impor bahan pangan. Di tengah tekanan



harga yang tinggi dan rapuhnya sistem pangan global, BSGI menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi internasional tetap memungkinkan bahkan dalam situasi geopolitik yang sangat kompleks. Keberhasilan sementara dari inisiatif ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara dapat berperan penting dalam menjaga aliran perdagangan komoditas vital, sekaligus memberikan harapan bagi jutaan orang yang terancam kelaparan di berbagai belahan dunia.

Pelaksanaan Black Sea Grain Initiative (BSGI) menunjukkan hasil yang cukup signifikan, dengan berhasil menyalurkan jutaan ton biji-bijian ke berbagai negara importir. Keberhasilan ini berdampak langsung terhadap stabilisasi harga di pasar global dan memberikan sedikit ruang napas bagi negara-negara yang paling terdampak krisis (UNCTAD, 2023). Inisiatif ini memungkinkan pengiriman lebih dari 33 juta ton biji-bijian dan produk pangan lainnya ke 45 negara di tiga benua, termasuk banyak negara berkembang dan kurang berkembang yang sangat bergantung pada impor pangan (United Nations, 2023). Dampak positif tersebut tidak hanya membantu menekan lonjakan harga, tetapi juga memperlihatkan bahwa diplomasi multilateral masih mampu menghasilkan solusi konkret dalam situasi geopolitik yang kompleks. United Nations bahkan menggambarkan BSGI sebagai “a lifeline for global food security, and a beacon of hope in a tense geopolitical situation,” yang menegaskan peran vital kerja sama internasional dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok pangan dunia (United Nations, 2023). Meskipun demikian, keberlanjutan inisiatif ini terus dibayangi ketidakpastian. Ketika Rusia menarik diri dari kesepakatan pada Juli 2023, kekhawatiran dunia kembali mencuat – menggambarkan betapa rapuhnya mekanisme diplomatik dalam merespons dinamika konflik yang terus berlangsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara kritis peran Black Sea Grain Initiative dalam menghadapi krisis pangan global yang dipicu oleh konflik bersenjata. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi nyata BSGI dalam menjaga stabilitas sistem pangan internasional di tengah gangguan rantai pasok akibat perang, serta menelaah bagaimana inisiatif ini diterjemahkan ke dalam mekanisme kebijakan yang efektif di lapangan. Pertanyaan utama yang diangkat dalam studi ini meliputi: sejauh mana BSGI mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan dunia, baik dalam jangka pendek maupun menengah, serta tantangan geopolitik apa saja yang muncul dalam proses implementasinya, terutama pasca penarikan sepihak oleh Rusia dari perjanjian tersebut.



Dalam konteks ini, studi ini juga mempertimbangkan aspek diplomasi multilateral, ketergantungan negara berkembang terhadap impor pangan, serta dinamika kekuasaan global yang memengaruhi keberlanjutan inisiatif tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk menilai relevansi, efektivitas, dan prospek jangka panjang BSGI dalam konteks keamanan pangan global yang semakin kompleks dan rentan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam peran strategis BSGI sebagai instrumen diplomasi pangan yang kompleks, sekaligus mengevaluasi hambatan geopolitik yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan menjadikan BSGI sebagai studi kasus utama, kajian ini akan membedah keterkaitan antara keamanan, ekonomi, dan diplomasi dalam konteks krisis global. Dari sisi akademik, studi ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang hubungan internasional, terutama terkait isu keamanan non-tradisional yang melibatkan interaksi antara konflik bersenjata dan distribusi pangan global. Di sisi lain, secara praktis, temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi perancang kebijakan, organisasi internasional, dan pelaku kemanusiaan dalam membentuk pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam merespons tantangan ketahanan pangan global yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus sebagai fondasi utama dalam analisis. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh fenomena yang kompleks dan kontekstual, khususnya Black Sea Grain Initiative sebagai instrumen diplomasi pangan dalam situasi geopolitik yang dinamis pasca invasi Rusia ke Ukraina. Metode kualitatif memungkinkan eksplorasi informasi yang bersifat naratif dan interpretatif, serta sarat makna, yang kerap kali tidak dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif. Studi kasus digunakan karena fokusnya pada satu kebijakan atau peristiwa tertentu dalam konteks nyata, sehingga dapat mengungkap keterkaitan antara proses kebijakan, aktor yang terlibat, serta dinamika hasil yang muncul dalam praktik diplomasi internasional. Pilihan metodologis ini juga sejalan dengan tren terkini dalam penelitian kualitatif yang menekankan integrasi teknologi digital, pemanfaatan pendekatan lintas disiplin, serta adopsi metode partisipatif untuk memperluas



cakupan dan kedalaman pemahaman terhadap fenomena sosial dan politik global yang terus berubah (Saraswati, 2025).

Data yang dianalisis dalam studi ini bersumber dari dokumen sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelaahan dokumen secara sistematis. Peneliti mengakses berbagai jenis sumber yang relevan, seperti laporan resmi dari lembaga internasional (misalnya UNCTAD, FAO, dan PBB), publikasi kebijakan dari lembaga think tank global, artikel ilmiah, serta liputan media arus utama yang kredibel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan Black Sea Grain Initiative, yang ditelaah melalui berbagai aspek, mulai dari proses perundingan, bentuk implementasi, dampak terhadap distribusi pangan internasional, hingga tantangan politik dan keamanan yang memengaruhi kelangsungannya. Pemilihan data didasarkan pada kriteria relevansi substantif terhadap topik, yakni yang membahas BSGI, dinamika konflik Rusia-Ukraina, diplomasi pangan, serta upaya internasional dalam menjaga ketahanan pangan. Rentang waktu data dibatasi pada publikasi sejak tahun 2022 agar dapat menangkap perubahan yang berlangsung secara aktual dan relevan.

Tahapan analisis dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif serta pendekatan tematik untuk menemukan pola-pola pemaknaan dalam data. Proses dimulai dengan menyeleksi dan mereduksi data dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan, kemudian menyusunnya secara naratif dan mengelompokkannya berdasarkan tema-tema yang muncul dari data. Interpretasi data dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori keamanan non-tradisional dan saling ketergantungan kompleks, untuk menjawab rumusan masalah dan menghubungkannya dengan dinamika hubungan internasional yang sedang berlangsung. Untuk menjaga keabsahan temuan, dilakukan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari berbagai jenis dokumen yang berasal dari institusi dan perspektif berbeda. Reliabilitas penelitian dijamin melalui pencatatan prosedur analisis secara terbuka dan runtut, agar proses penarikan kesimpulan dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh pihak lain dengan cara yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Black Sea Grain Initiative terhadap Stabilitas Pangan Global



Implementasi Black Sea Grain Initiative (BSGI) sejak Juli 2022 hingga awal 2023 terbukti menjadi intervensi diplomatik yang berdampak besar terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan global. Inisiatif yang dimediasi oleh United Nations dan Turki ini berhasil membuka kembali jalur ekspor utama Ukraina melalui pelabuhan-pelabuhan seperti Odesa, Chornomorsk, dan Yuzhny di Laut Hitam. Berdasarkan laporan UNCTAD, lebih dari 33 juta ton biji-bijian dan produk pangan lainnya telah dikirimkan ke pasar global. Dari jumlah tersebut, 49% diekspor ke negara-negara berkembang dan 6% ke negara-negara yang tergolong Least Developed Countries (LDCs) (UNCTAD, 2023). Negara-negara seperti Bangladesh, Ethiopia, dan Somalia menjadi penerima utama, termasuk Nigeria yang sangat bergantung pada gandum impor dari kawasan Laut Hitam.

Ketika BSGI ditangguhkan pada Juli 2023, dampaknya terasa nyata di berbagai negara importir, terutama di kawasan yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari Laut Hitam. Dalam konteks ini, Tunde dan Garba (2025) mencatat bahwa penghentian BSGI memperburuk gangguan logistik dan menambah tekanan inflasi harga pangan di pasar domestik. Harga gandum, minyak nabati, dan komoditas pokok lainnya melonjak tajam, memperparah kerentanan yang sudah ada akibat inflasi, depresiasi nilai tukar, dan keterbatasan produksi dalam negeri. Efek ini tidak hanya membatasi akses pangan bagi kelompok rentan, tetapi juga memperbesar risiko ketidakstabilan sosial di negara-negara terdampak. Kondisi ini menciptakan krisis berlapis yang mencerminkan betapa rentannya sistem pangan global terhadap gangguan pada jalur pasok strategis, terutama ketika tidak ada mekanisme alternatif yang siap menggantikan peran inisiatif multilateral seperti BSGI.

Efektivitas BSGI tercermin dalam tren penurunan Indeks Harga Pangan FAO sebesar 18% sejak puncaknya pada Maret 2022. Penurunan ini memberikan ruang jeda terhadap tekanan inflasi pangan global yang meningkat tajam pasca-invasi Rusia. Menurut Chauhan (2024), konflik bersenjata seperti perang Rusia-Ukraina telah mengganggu rantai pasok dan memicu volatilitas harga pangan global, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi negara-negara berkembang. Tekanan ini terasa dalam bentuk inflasi domestik, depresiasi mata uang, serta penurunan daya beli, khususnya di kawasan rentan seperti Afrika dan Asia Selatan. Dalam konteks tersebut, BSGI menjadi instrumen penting untuk meredam disrupsi distribusi pangan internasional, meskipun efektivitasnya dalam menurunkan harga pangan domestik di sejumlah negara tetap terbatas karena faktor struktural lainnya.



Keberlanjutan BSGI tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi global, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas sosial dan politik di negara-negara berkembang. BSGI merupakan respons nyata komunitas internasional terhadap potensi ketidakstabilan yang muncul akibat terganggunya distribusi pangan global (Nguyen dkk., 2023). Gangguan semacam ini berisiko memicu krisis kemanusiaan di kawasan yang sangat bergantung pada impor pangan, terutama negara berpendapatan rendah. Data menunjukkan bahwa lebih dari 33 juta ton biji-bijian telah disalurkan ke 45 negara, hampir separuhnya menuju negara-negara berkembang (United Nations, 2023). Oleh karena itu, BSGI berperan penting sebagai instrumen kolaboratif dalam meredam dampak sosial dari kelangkaan pangan di tengah konflik (UNCTAD, 2023).

Temuan dari berbagai laporan resmi mendukung bahwa BSGI mampu menstabilkan harga dan pasokan pangan global. Namun demikian, inisiatif ini bersifat sementara dan sangat bergantung pada stabilitas politik serta kesepakatan para pihak. Ketika Rusia menyatakan keluar dari BSGI pada Juli 2023, gejolak pasar kembali terjadi. Berdasarkan laporan PSEKP (2024), langkah tersebut menyebabkan lonjakan harga komoditas strategis di pasar global, termasuk kenaikan harga kedelai sebesar 7,09%, beras sebesar 6,42%, dan pupuk urea hingga 16,39% (PSEKP, 2024). Efek domino dari keputusan sepihak ini memperkuat bukti bahwa sistem pangan global sangat rentan terhadap tekanan geopolitik dan gangguan distribusi dari wilayah-wilayah krisis.

Data dari UNCTAD (2023) menunjukkan bahwa menjelang berakhirnya BSGI, volume ekspor biji-bijian Ukraina menurun drastis akibat meningkatnya risiko keamanan dan lambatnya proses inspeksi kapal di pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam. Di tengah keterbatasan ini, Ukraina berusaha mengalihkan jalur ekspornya melalui pelabuhan alternatif seperti Constanța di Rumania dan jalur darat melalui Polandia. Namun, seperti dijelaskan oleh Sadłowski dan Zajac (2024), rute darat tersebut memiliki kapasitas terbatas dan hanya mampu menampung sebagian kecil dari volume ekspor Ukraina. Mereka mencatat bahwa kapasitas maksimum jalur Polandia hanya sekitar 9,6 juta ton per tahun, sementara ekspor biji-bijian Ukraina pada tahun 2022 saja melebihi 38 juta ton. Ketimpangan ini menyebabkan kemacetan logistik dan biaya pengiriman yang jauh lebih tinggi dibandingkan jalur laut, sehingga tidak mampu sepenuhnya menggantikan peran strategis Laut Hitam. Temuan ini menegaskan bahwa BSGI beroperasi dalam ruang diplomasi yang sangat rentan, dan ketergantungannya



pada stabilitas politik serta kesepakatan antar aktor menjadikan sistem pangan global berada dalam kondisi yang fluktuatif dan mudah terguncang.

Secara keseluruhan, temuan dalam bagian ini menunjukkan bahwa BSGI berkontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan jangka pendek di tengah krisis global. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa kolaborasi internasional dapat menghasilkan solusi konkret yang bersifat inklusif dan berdampak luas. Namun, keberhasilan ini juga sekaligus menyoroti ketergantungan dunia terhadap jalur logistik yang sempit dan aktor-aktor dominan dalam sistem pangan global. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan infrastruktur logistik alternatif dan mekanisme distribusi yang lebih beragam sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan dunia.

Tantangan Geopolitik dan Kerapuhan Diplomasi Pangan Global

Konteks geopolitik yang membentuk lahirnya Black Sea Grain Initiative (BSGI) memainkan peran utama dalam menentukan keberlanjutan dan efektivitasnya. Sejak awal, kesepakatan ini dibentuk melalui negosiasi penuh ketegangan antara Rusia dan Ukraina, serta tarik-menarik kepentingan antara negara-negara Barat dan Rusia. Meskipun dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Turki, posisi Rusia yang dominan dalam perdagangan pupuk dan produk pertanian lainnya memberi keunggulan dalam perundingan. Serangan Rusia terhadap pelabuhan dan terminal ekspor Ukraina setelah penangguhan BSGI pada pertengahan 2023 menunjukkan ketiadaan mekanisme penegakan dan verifikasi yang kuat dalam perjanjian ini, yang membuat implementasi BSGI sangat bergantung pada kehendak politik sepihak (Cyfirma, 2023).

Penarikan Rusia dari BSGI pada Juli 2023 menegaskan rapuhnya fondasi diplomatik dari kesepakatan tersebut. Konflik bersenjata yang mendasari perjanjian ini telah menimbulkan gangguan signifikan terhadap rantai pasok global dan memperburuk tekanan inflasi pangan (PSEKP, 2022). Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pengimpor komoditas pertanian, tetapi juga oleh negara-negara produsen yang menghadapi lonjakan biaya produksi akibat mahalnya energi dan pupuk. Di sisi lain, Kacperska dkk. (2025) mencatat bahwa ketidakpastian seputar kelanjutan BSGI menciptakan lonjakan volatilitas harga gandum di bursa Euronext, menandai tingginya sensitivitas pasar terhadap disrupsi geopolitik yang terkait langsung dengan distribusi pangan.



Data dari FAO (2022a) menunjukkan bahwa Rusia dan Ukraina secara kolektif menyumbang sekitar 25 persen dari ekspor gandum global dan hampir 72 persen dari ekspor minyak bunga matahari dunia. Oleh karena itu, gangguan terhadap produksi dan distribusi dari kedua negara ini memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ketahanan pangan global. Hal ini tidak hanya mendorong kenaikan harga pangan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian pasar dan memperburuk aksesibilitas pangan bagi negara-negara berkembang, yang sebagian besar sangat bergantung pada impor komoditas dari kawasan Laut Hitam (FAO, 2022a).

Jalur alternatif melalui Polandia dan wilayah Balkan memang pernah diusulkan sebagai pengganti rute Laut Hitam untuk menyalurkan ekspor pertanian Ukraina. Namun, menurut Sadłowski dan Zajac (2024), jalur darat tersebut memiliki kapasitas terbatas dan tidak mampu menampung volume ekspor dalam waktu cepat. Tingginya biaya logistik, keterbatasan infrastruktur, serta hambatan administratif menjadi kendala utama dalam efisiensi pengiriman. Bahkan, sejumlah negara Eropa Timur sempat memprotes masuknya komoditas pertanian Ukraina karena dianggap merugikan pasar domestik mereka sendiri. Ketegangan ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sistem logistik multilateral dan penyesuaian kebijakan perdagangan regional, solusi jalur darat hanya mampu berperan sebagai pelengkap, bukan pengganti penuh rute Laut Hitam (Sadłowski & Zajac, 2024).

Dalam kerangka teori saling ketergantungan kompleks, dinamika ini memperlihatkan bahwa aktor-aktor dalam sistem internasional tidak dapat bertindak sepenuhnya independen tanpa menimbulkan konsekuensi bagi pihak lain. Penarikan sepihak dari kesepakatan seperti BSGI menunjukkan bagaimana tindakan satu aktor dapat mengganggu keseimbangan global, terutama dalam sektor yang sangat sensitif seperti pangan. Ketidakseimbangan kekuasaan, minimnya mekanisme penyelesaian sengketa, dan absennya lembaga internasional yang kuat dalam menegakkan perjanjian menjadi hambatan utama dalam menciptakan diplomasi pangan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan geopolitik yang melingkupi BSGI menunjukkan bahwa keberhasilan diplomasi pangan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, tetapi juga oleh stabilitas politik, kepercayaan antaraktor, dan kapasitas institusi internasional dalam memfasilitasi kepatuhan dan akuntabilitas. Dalam jangka panjang, sistem pangan global perlu direformasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap koridor distribusi sempit



yang rawan konflik dan memperkuat institusi yang dapat memastikan kelangsungan distribusi pangan dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu.

Volatilitas Harga Komoditas Strategis dan Respons Pasar Global

Salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas BSGI adalah tingkat volatilitas harga komoditas strategis seperti gandum dan jagung di pasar global. Studi oleh Kacperska et al. (2025) yang menggunakan model GARCH membuktikan bahwa BSGI memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas harga di bursa Euronext dan pasar Eropa. Ketika BSGI diumumkan, terjadi penurunan tajam dalam tingkat volatilitas. Sebaliknya, ketika muncul ketidakpastian mengenai perpanjangan kesepakatan atau keputusan Rusia untuk keluar, volatilitas harga kembali meningkat secara signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa ekspektasi pasar sangat sensitif terhadap dinamika politik dan keamanan di kawasan Laut Hitam.

Salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas BSGI adalah tingkat volatilitas harga komoditas strategis seperti gandum dan jagung di pasar global. Studi oleh Kacperska dkk. (2025) yang menggunakan model GARCH membuktikan bahwa pengumuman BSGI berkorelasi dengan penurunan volatilitas harga, khususnya pada kontrak gandum dan jagung di bursa Euronext. Sebaliknya, ketidakpastian mengenai perpanjangan kesepakatan, terutama menjelang berakhirnya pada Juli 2023, kembali meningkatkan volatilitas secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa ekspektasi pasar sangat sensitif terhadap dinamika politik dan keamanan di kawasan Laut Hitam, dan bahwa stabilitas harga pangan global kini tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi dan permintaan, tetapi juga oleh kejelasan diplomasi dan kebijakan multilateral yang menyertainya. Ketika arsitektur diplomasi rapuh atau tidak disertai dengan mekanisme jangka panjang, reaksi pasar menjadi cepat dan tidak proporsional terhadap perubahan geopolitik.

Kenaikan harga setelah keluarnya Rusia dari BSGI juga menandai lemahnya sistem mitigasi risiko dalam perdagangan pangan global. Selain dampak langsung terhadap harga pangan, lonjakan harga pupuk urea hingga 16,39 persen turut menambah tekanan terhadap sektor pertanian, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah yang menghadapi keterbatasan subsidi dan akses terhadap input pertanian (PSEKP, 2023). Efek berantai ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan pada satu elemen rantai pasok pangan dapat dengan cepat menyebar ke sektor-sektor lain yang saling bergantung, menciptakan potensi krisis



sistemik yang sulit dikendalikan. Dalam banyak kasus, lonjakan harga input juga berdampak pada musim tanam berikutnya, memperpanjang efek guncangan hingga ke siklus produksi selanjutnya.

Situasi ini memperkuat pentingnya transparansi dan komunikasi kebijakan dalam menciptakan prediktabilitas pasar. Minimnya jaminan keberlanjutan atas BSGI membuat pelaku pasar menghadapi ketidakpastian tinggi yang memengaruhi keputusan perdagangan, investasi, dan logistik di sektor pangan. Dalam konteks ini, kejelasan arah politik dan tata kelola multilateral yang kuat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar komoditas strategis. FAO (2022b) juga mencatat bahwa ketidakpastian pasokan dapat memicu panic buying di negara-negara pengimpor, yang pada akhirnya memperburuk gangguan pasokan jangka pendek dan memperkuat fluktuasi harga dalam periode krisis.

Volatilitas harga tidak hanya berdampak pada pelaku pasar besar atau negara eksportir, tetapi juga memberikan tekanan langsung terhadap rumah tangga miskin di negara berkembang. Ketika harga pangan global melonjak, negara-negara pengimpor sering kali terpaksa menaikkan harga ritel, mengurangi subsidi, atau memperketat distribusi, yang semuanya berdampak negatif terhadap akses masyarakat terhadap pangan. Stabilitas harga, dalam hal ini, merupakan aspek krusial dari keamanan manusia yang seharusnya menjadi fokus utama dalam kebijakan perdagangan pangan global. UNCTAD (2023) mencatat bahwa krisis biaya hidup yang berulang telah memperburuk ketimpangan dan memicu strategi bertahan hidup yang berisiko bagi kelompok rentan, sehingga mengancam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti penghapusan kelaparan dan kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan seluruh bukti empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BSGI memberikan dampak nyata terhadap penurunan volatilitas harga dan stabilisasi pasar komoditas secara global. Meskipun demikian, efek positif ini terbukti sangat sementara dan sangat bergantung pada kondisi geopolitik yang dinamis dan tidak menentu. Oleh karena itu, dibutuhkan rancangan kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan mendadak serta membangun sistem ketahanan harga yang lebih tangguh dan adaptif. Langkah-langkah ini mencakup diversifikasi sumber pasokan pangan, peningkatan cadangan strategis di berbagai kawasan, serta penguatan arsitektur kerja sama internasional dalam bidang distribusi pangan. Studi oleh Kuhla dkk. (2024) menunjukkan bahwa kerja sama global, termasuk melalui jalur ekspor Laut Hitam, jalur solidaritas, dan pengurangan



hambatan perdagangan, telah berhasil menahan lonjakan harga gandum hingga 13 persen lebih rendah dibandingkan skenario tanpa intervensi. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan lintas negara sebagai fondasi utama untuk mencegah gejolak harga yang berkepanjangan akibat krisis pangan dan gangguan rantai pasok.

Implikasi Strategis terhadap Tata Kelola Pangan dan Arah Diplomasi Global

Black Sea Grain Initiative secara tidak langsung membuka kembali diskusi global mengenai perlunya reformasi tata kelola pangan internasional. Dalam kerangka teori keamanan non-tradisional, pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai hak dasar manusia yang memerlukan perlindungan dari sistem internasional. Kelemahan BSGI dalam hal penegakan dan keberlanjutan memperlihatkan bahwa hingga saat ini belum ada kerangka hukum global yang secara tegas menjamin akses pangan dalam situasi konflik. Dalam konteks ini, Nguyen dkk. (2023) menekankan bahwa absennya perjanjian internasional yang mengikat terkait keamanan pangan menunjukkan adanya kekosongan institusional yang serius. Mereka menegaskan pentingnya reformasi sistem tata kelola pangan global yang lebih inklusif dan adaptif, sebagai upaya untuk mengurangi ketidakpastian dalam rantai pasok internasional dan memperkuat perlindungan terhadap hak atas pangan, terutama di tengah meningkatnya krisis dan konflik lintas negara.

Ketergantungan global terhadap segelintir negara eksportir besar menciptakan kerentanan struktural dalam sistem pangan internasional. Ketika negara-negara tersebut mengalami gangguan akibat konflik, sanksi, atau bencana, dampaknya dengan cepat menjalar ke seluruh dunia. Dalam konteks ini, pentingnya pengembangan jalur logistik alternatif seperti koridor melalui Polandia dan kawasan Balkan menjadi semakin relevan. Meskipun menawarkan solusi sementara, rute-rute ini menghadapi berbagai hambatan, mulai dari infrastruktur terbatas, tingginya biaya pengiriman, hingga resistensi politik dari negara-negara transit (Sadłowski & Zajac, 2024). Sejalan dengan itu, kolaborasi logistik dan distribusi berbasis regional dinilai mampu memperkuat resiliensi sistem pangan global terhadap tekanan geopolitik, serta menjadi fondasi bagi mekanisme permanen yang lebih adaptif terhadap krisis jangka panjang (Kuhla, Puma, & Otto, 2024).

Dalam hal ini, keterbatasan jalur alternatif seperti koridor melalui Polandia dan Balkan semakin memperkuat urgensi diversifikasi rute distribusi pangan global. Kapasitas yang



terbatas, hambatan logistik, serta resistensi dari negara-negara transit menunjukkan bahwa mengandalkan satu jalur dominan seperti Laut Hitam sangat berisiko dalam konteks geopolitik yang dinamis (Sadłowski & Zajac, 2024). Oleh karena itu, membangun infrastruktur logistik yang lebih tangguh dan memperluas koordinasi lintas kawasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan resiliensi sistem pangan internasional. Studi lain juga menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam mendukung jalur ekspor Ukraina melalui Laut Hitam dan Jalur Solidaritas secara nyata menahan lonjakan harga gandum hingga tiga belas persen lebih rendah dibandingkan skenario tanpa intervensi. Upaya kolektif semacam ini memperkuat urgensi penguatan respons kebijakan yang terkoordinasi dan berbasis jangka panjang dalam menghadapi krisis pangan global (Kuhla dkk., 2024).

BSGI merupakan contoh signifikan bagaimana diplomasi dapat digunakan sebagai instrumen pengelolaan konflik di tengah ketegangan geopolitik. Meskipun berbasis pada aspek teknis logistik dan perdagangan, kesepakatan ini berhasil membuka ruang negosiasi antara pihak-pihak yang sedang berkonflik, mencerminkan potensi diplomasi kemanusiaan dalam menciptakan titik temu yang pragmatis meskipun bersifat sementara. Namun, seperti yang disorot oleh laporan dari CSIS, keberhasilan semacam ini tidak dapat bertahan lama tanpa dukungan kerangka hukum internasional yang kuat serta institusi global yang memiliki otoritas dan legitimasi dalam penegakan norma (CSIS, 2024). Lebih lanjut, kemampuan Rusia untuk memanipulasi ekspor pertanian Ukraina sebagai alat tekanan politik memperlihatkan lemahnya sistem pengamanan distribusi pangan internasional di tengah konflik bersenjata (CSIS, 2022).

Studi ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai keterkaitan antara perdagangan, keamanan, dan diplomasi dalam sistem pangan global. BSGI tidak hanya dapat dilihat sebagai proyek logistik atau mekanisme pasar, melainkan sebagai persimpangan antara urgensi kemanusiaan dan strategi geopolitik. Pengalaman dari pelaksanaan inisiatif ini memperjelas bahwa stabilitas pangan global tidak akan terjamin hanya melalui respons darurat, tetapi membutuhkan kerangka kerja internasional yang tangguh, berorientasi jangka panjang, dan inklusif yang dapat memastikan kesinambungan distribusi pangan lintas negara (CSIS, 2024).



KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji peran Black Sea Grain Initiative (BSGI) dalam merespons krisis pangan global yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Inisiatif ini bukan sekadar langkah teknis untuk memulihkan jalur distribusi melalui Laut Hitam, melainkan bentuk diplomasi pangan yang mempertemukan kepentingan kemanusiaan dan kalkulasi geopolitik. Temuan utama menunjukkan bahwa BSGI mampu menyalurkan lebih dari 33 juta ton biji-bijian ke 45 negara dan menurunkan indeks harga pangan hingga 18 persen sejak puncaknya pada Maret 2022. Namun, efektivitas tersebut tidak berkelanjutan setelah Rusia menarik diri dari perjanjian pada Juli 2023, yang memicu lonjakan harga dan gangguan rantai pasok global. Jalur distribusi alternatif seperti melalui Polandia dan Balkan pun tidak cukup mampu menggantikan posisi strategis Laut Hitam karena hambatan infrastruktur dan logistik.

Situasi ini menegaskan bahwa sistem pangan global sangat bergantung pada jalur sempit dan keputusan sepihak dari aktor tertentu. Ketika krisis geopolitik muncul, distribusi global langsung terguncang, berdampak luas pada stabilitas harga dan akses pangan. Oleh karena itu, BSGI harus dipahami sebagai katalis menuju reformasi tata kelola pangan global. Sistem yang lebih tahan terhadap tekanan politik membutuhkan pembangunan infrastruktur yang merata, diversifikasi jalur perdagangan, serta kebijakan jangka panjang yang melindungi negara rentan dari disrupsi yang mereka tidak sebabkan.

Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan global yang lebih adaptif dan berjangka panjang dalam merespons krisis pangan. Penguatan cadangan kawasan, investasi logistik alternatif, dan sistem peringatan dini harus menjadi prioritas. Pendekatan keamanan nontradisional menjadi penting karena mampu menjelaskan keterkaitan antara konflik, ekonomi, dan hak dasar manusia. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi harus menjadi pilar utama dari stabilitas dan kerja sama internasional. Dalam kondisi geopolitik yang semakin kompleks, hanya melalui komitmen kolektif dunia dapat memastikan bahwa tidak ada bangsa yang dibiarkan kelaparan akibat konflik.



DAFTAR PUSTAKA

- Center for Strategic and International Studies. (2022, June 2). *Why is Russia blocking Ukraine's food exports?* <https://www.csis.org/analysis/why-russia-blocking-ukraines-food-exports>
- Center for Strategic and International Studies. (2024, February 15). *Russia-Ukraine war and global food security*. CSIS Global Food Security Program. <https://www.csis.org/analysis/russia-ukraine-war-and-global-food-security>
- Chauhan, R. (2024). The impact of armed conflicts on global food supply chains. *International Journal of Future Management Research*, 5(5), 112-124. <https://www.ijfmr.com/papers/2024/5/27394.pdf>
- Cyfirma. (2023). *Black Sea grain deal: A geopolitical ETLM perspective*. Cyfirma Research. <https://www.cyfirma.com/research/black-sea-grain-deal-a-geopolitical-etlm-perspective/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022a). *The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the war in Ukraine: Information Note, 10 June 2022 Update*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://openknowledge.fao.org/items/6894d813-d9fe-4348-939c-5b73c2539fd7>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022b). *The Black Sea is a strategic hub in the global grain trade*. FAO Knowledge Repository. <https://openknowledge.fao.org/items/6894d813-d9fe-4348-939c-5b73c2539fd7>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022c). *FAO food price index*. <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>
- Kacperska, E. M., Łukasiewicz, K., Skrzypczyk, M., & Stefańczyk, J. (2025). Price volatility in the European wheat and corn market in the Black Sea Agreement context. *Agriculture*, 15(1), 91. <https://doi.org/10.3390/agriculture15010091>
- Nguyen, T. T., Timilsina, R. R., Sonobe, T., & Rahut, D. B. (2023). Interstate war and food security: Implications from Russia's invasion of Ukraine. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, Article 1080696. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1080696>



- Pusat Strategis Kajian Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). *Mewaspadaai dampak keluarnya Rusia dari kesepakatan Black Sea Grain Initiative terhadap ketahanan pangan global dan domestik*. <http://psekp.setjen.pertanian.go.id>
- Pusat Strategis Kajian Pangan. (2022). *Antisipasi dampak krisis Rusia-Ukraina terhadap sektor pertanian Indonesia* (PB-03/2022). Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <http://psekp.setjen.pertanian.go.id>
- Sadłowski, A., & Zajac, A. (2024). *Export of Ukrainian agricultural products through Poland – route restrictions*. *Agricultural and Resource Economics*, 10(4), 29–46. <https://doi.org/10.51599/are.2024.10.04.02>
- Saraswati, P. (2025). *Trends and challenges in qualitative research: A comprehensive review*. *Mathews Journal of Nursing and Health Care*, 7(1), 57. <https://doi.org/10.30654/MJNH.100057>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *A trade hope: The impact of the Black Sea Grain Initiative*. <https://unctad.org/a-trade-hope>
- United Nations. (2023). *The Black Sea Grain Initiative: What was achieved?* <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/achievements>